Jurnal
JAMBURA
ILMU KOMUNIKASI
e-ISSN : 3026-2380 jik.fis.ung.ac.id

Volume 4 Issue 1, 2026
https://doi.org/10.37905/jik.v4i1

Dialektika Resolusi Konflik dan Konsolidasi Birokrasi Pasca-Krisis Kepemimpinan Daerah di Kabupaten Boalemo

Abd. Halid Lemba[1], Wira Pratama Rumambie [2], Mohammad Akram Mursalim[3], Aditya Hambali[4] , Siti Mayasari Pakaya[4]
Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor penyebab, dampak sosial-pemerintahan, serta dinamika upaya penyelesaian konflik pasca-lengsernya Bupati Boalemo (Darwis Moridu). Menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama lima informan kunci serta observasi lapangan di Desa Dulupi dan sekitarnya. Kerangka teoritis yang digunakan adalah Teori Konflik Dialektika Ralf Dahrendorf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab konflik bersumber dari akumulasi ketidakstabilan afiliasi politik, ketimpangan pembangunan antarwilayah, ketidakharmonisan birokrasi, re-aktivasi kasus hukum lama, ketidakjelasan legitimasi ijazah, pengabaian peran wakil bupati, perilaku kontroversial personal, serta lemahnya komunikasi kebijakan. Dampak konflik memicu fragmentasi hubungan sosial, perubahan perilaku defensif masyarakat, disfungsi birokrasi, dan tekanan psikologis publik. Proses penyelesaian konflik berlangsung melalui mekanisme yuridis Mahkamah Agung, pergantian kepemimpinan struktural, serta rekonsiliasi sosial kultural berbasis nilai kekerabatan lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik kekuasaan lokal tidak hanya berdampak destruktif, tetapi juga mendorong redistribusi otoritas dan penyesuaian struktur pemerintahan yang lebih kondusif.

Keywords : *Konflik Politik Lokal, Keretakan Sosial, Birokrasi, Kabupaten Boalemo.*

Correspondence: *Halidlemba@ung.ac.id*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Copyright © 2023 The Author(s).

1. INTRODUCTION

Dinamika politik lokal di Indonesia pasca-desentralisasi sering kali menjadi arena kontestasi kekuasaan yang sarat akan potensi konflik sosial dan politik. Otak desentralisasi yang sejatinya dirancang untuk mendekatkan pelayanan publik justru kerap melahirkan fragmentasi elit di tingkat daerah (Hadiz, 2019, hlm. 45). Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, figur seorang kepala daerah memegang peranan sentral sebagai perekat kohesi sosial sekaligus pengarah kebijakan pembangunan (Nugroho, 2019, hlm. 112). Ketika legitimasi seorang pemimpin terganggu akibat isu etika, hukum, maupun gaya kepemimpinan yang otoriter, instabilitas tata kelola pemerintahan tidak dapat terhindarkan (Sari & Putra, 2021, hlm. 88). Fenomena ini terlihat jelas dalam dinamika pemerintahan di Kabupaten Boalemo, khususnya pasca-pemberhentian Bupati Darwis Moridu dari jabatannya.

Konflik yang melingkupi pemakzulan atau pemberhentian kepala daerah tidak pernah berdiri tunggal dalam satu dimensi kausalitas. Di tingkat elit, perebutan akses terhadap sumber daya ekonomi dan posisi birokrasi memicu ketegangan antar-aksi politik (Turner, 2018, hlm. 201). Sementara itu, di tingkat akar rumput (*grassroots*), keputusan politik sentral kerap direspons dengan polarisasi massa yang merusak tatanan hubungan kemasyarakatan (Prasetyo, 2020, hlm. 67). Ketimpangan distribusi pembangunan wilayah dan minimnya ruang dialog interaktif antara pemerintah dan warga kian memperuncing kekecewaan publik (Rahman, 2022, hlm. 134). Oleh karena itu, pengangkatan kembali persoalan hukum lama serta persoalan keabsahan administrasi ijazah menjadi pemicu (*trigger factor*) yang mengubah konflik laten menjadi konflik terbuka di tengah masyarakat (Wang & Zhang, 2020, hlm. 310).

Dampak dari eskalasi konflik politik lokal ini merembet langsung pada degradasi kualitas kehidupan sosial dan stabilitas birokrasi. Aparatur sipil negara (ASN) terjebak dalam dilema loyalitas akibat hubungan kerja yang kurang kondusif dan komunikasi pimpinan yang cenderung intervensif (Wijaya & Lestari, 2023, hlm. 155). Terganggunya keharmonisan di dalam struktur internal birokrasi berimplikasi langsung pada stagnasi pelayanan publik dan keterlambatan eksekusi program-program pembangunan strategis (Firmansyah, 2022, hlm. 94). Di sisi lain, masyarakat mengalami trauma psikologis sosial yang ditandai dengan munculnya kehati-hatian berlebih, kecurigaan antar-warga, dan sikap apatisme terhadap isu-isu kebangsaan maupun politik lokal (Hidayat & Kurniawan, 2021, hlm. 78; Lestari, 2023, hlm. 202).

Untuk menjelaskan kompleksitas fenomena ini secara komprehensif, pendekatan teoritis yang relevan adalah Teori Konflik Dialektika yang dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf. Dahrendorf memandang bahwa masyarakat memiliki dua wajah, yakni konsensus dan konflik, di mana struktur sosial disatukan oleh "kekuasaan yang dipaksakan" (*imperatively coordinated associations*) (Dahrendorf, 1959, hlm. 165). Dalam pandangan Dahrendorf, konflik bersumber dari penataan otoritas yang tidak seimbang antara kelompok yang memegang kekuasaan (*dominance*) dan kelompok yang terikat oleh kekuasaan (*subjection*). Ketika distribusi otoritas dan sumber daya dinilai tidak adil, kelompok yang tertekan akan membentuk kepentingan nyata (*manifest interests*) untuk merestrukturisasi tatanan kekuasaan yang ada (Dahrendorf, 1959, hlm. 180).

Meskipun kajian mengenai pemakzulan kepala daerah telah banyak dilakukan dalam studi ilmu politik, penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan analisis faktor mikro-personal, kelembagaan birokrasi, dan dampak psikologi-sosial pasca-lengsernya bupati dalam bingkai teoritis Dahrendorf masih sangat terbatas. Sebagian besar literatur terdahulu fokus pada dimensi hukum tata negara atau dinamika pemilu semata (Santoso, 2020, hlm. 115; Arifin, 2021, hlm. 53). Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pengungkapan secara komprehensif mengenai bagaimana konflik otoritas formal berkonvergensi dengan mekanisme rekonsiliasi sosial berbasis nilai lokal (*informal reconciliation*) di pedesaan pasca-krisis kepemimpinan. Penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi teoritis bagi sosiologi politik lokal serta masukan praktis bagi mitigasi konflik pemerintahan daerah.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif (*descriptive case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi secara mendalam makna, persepsi, serta dinamika hubungan sosial-politik yang kompleks di balik peristiwa pemberhentian kepala daerah (Creswell & Creswell, 2018, hlm. 43). Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Boalemo, Gorontalo, dengan fokus pengamatan utama di Desa Dulupi dan kawasan sekitar Kota Raja, tempat eskalasi dampak sosial dan pembangunan terpusat.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang melibatkan lima orang informan kunci yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan, pengetahuan, dan posisi strategis mereka dalam dinamika sosial-politik lokal selama dan sesudah kepemimpinan Bupati Darwis Moridu. Adapun rincian informan mencakup: (tokoh masyarakat/pengamat lokal, tokoh warga Desa Dulup, birokrat/aparatur pemerintah, pengamat hukum dan administrasi daerah, serta tokoh pemuda/elemen masyarakat sipil).

Data sekunder dihimpun melalui dokudokumentasi resmi, berita media massa lokal, serta laporan pembangunan daerah Kabupaten Boalemo. Pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga teknik utama: wawancara terstruktur dan bebas, observasi non-partisipan terhadap interaksi sosial warga pasca-konflik, serta studi dokumen. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode guna memastikan validitas data yang diperoleh di lapangan (Miles et al., 2014, hlm. 89).

Teknik analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldanha (2014), yang mencakup empat tahapan berkesinambungan: pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Seluruh temuan lapangan dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: faktor penyebab konflik, dampak sosial-pemerintahan, dan upaya penyelesaian. Data kualitatif tersebut kemudian dianalisis secara kritis menggunakan lensa konseptual Teori Konflik Dialektika Ralf Dahrendorf.

RESULTS

Pengungkapan temuan empiris dalam penelitian kualitatif ini berfokus pada dinamika konflik sosial-politik pasca-pemberhentian Bupati Boalemo (Darwis Moridu). Data primer dihimpun melalui penelusuran dokumen serta wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama lima informan kunci di Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Untuk menyajikan gambaran selektif dan sistematis mengenai bukti-bukti wawancara yang menjadi dasar analisis, Tabel 1 memetakan porsi kutipan utama berdasarkan sub-fokus penelitian.

Tabel 1. Matriks Selektif Temuan Wawancara dan Bukti Empiris (*Evidence-Based*)

Dimensi Kajian	Sub-Fokus	Informan	Kutipan Wawancara Utama (Empirical Evidence)	Indikator Temuan Lapangan
Faktor Penyebab Saat Menjabat	Ketidakstabilan Afiliasi Politik	Ruis Adam	"Dia itu sering pindah-pindah partai, dari Hanura ke Nasdem lalu ke PDIP. Jadi orang-orang yang awalnya mau mendukung jadi marah karena dianggap tidak konsisten dalam politik."	Terjadinya trust-based conflict dan perpecahan konstituen awal.
	Ketimpangan Pembangunan	Nurdin M. Jaini	"Selama ini, hampir seluruh kegiatan pembangunan lebih banyak dipusatkan di Kota Raja, sehingga wilayah lain terkesan kurang mendapatkan perhatian... merasa dianaktirikan..."	Sentralisasi pembangunan dan marjinalisasi wilayah pedesaan (Desa Dulupi).
	Disharmonisasi Birokrasi	Erwan Djibu	"Dia sering mengeluarkan kata-kata yang menyinggung bawahan, sehingga banyak pegawai merasa tidak dihargai dan akhirnya marah."	Resistensi pasif ASN dan penurunan kinerja pelayanan internal.
Faktor Penyebab	Pengaktifan Kasus Hukum Lama	Erwan Djibu	"Masalah lama yang sudah sekitar 10 tahun itu diangkat kembali oleh kelompok tertentu sampai dibawa ke Mahkamah Agung dan akhirnya berujung pada pemberhentian."	Re-aktivasi konflik laten sebagai instrumen delegitimasi kekuasaan.
	Sengketa Keabsahan Ijazah	Erwan Djibu	"Ijazahnya sempat dipermasalahkan, bahkan sampai ke PTUN. Ada yang bilang tidak jelas, hanya pakai surat keterangan dari kepolisian."	Sengketa administrasi formal yang merusak kepercayaan publik.
	Marjinalisasi Wakil Bupati	Jein Djibu	"Wakil bupati tidak dipakai dalam pemerintahan. Padahal sudah diberikan fasilitas, tapi tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan."	Pemusatan kekuasaan sepihak dan keretakan elite eksekutif.
	Perilaku Personal Kontroversial	Amran Saripi	"Ada juga masalah pemukulan dan sikap emosional. Itu membuat masyarakat menilai kepemimpinan beliau kurang baik."	Degradasi legitimasi moral pimpinan di mata masyarakat
	Lemahnya Komunikasi Kebijakan	Amran Saripi	"Banyak kebijakan yang tidak dibicarakan secara baik dengan masyarakat, sehingga muncul kesalahpahaman dan kelompok-kelompok yang menentang."	Minimnya transparansi yang memicu resistensi kelompok masyarakat.

Dampak Konflik	Keretakan Hubungan Sosial	Ruis Adam	"Setelah beliau lengser, masyarakat itu sudah tidak seperti dulu lagi. Ada yang saling menjauh karena beda pendapat, jadi suasana di masyarakat itu terasa berubah."	Perubahan atmosfer sosial dan pengerusan kohesi warga.
	Perilaku Defensif & Apatis	Ruis Adam	"Masyarakat sekarang lebih hati-hati dalam bersikap. Tidak seperti dulu yang terbuka, sekarang kalau bicara soal politik atau pemerintah itu sudah agak tertutup."	Pergeseran sikap interaksi warga menjadi tertutup dan apatis.
	Disfungsi Birokrasi	Erwan Djibu	"Waktu itu pemerintahan sempat goyang. Banyak kebijakan yang tidak berjalan maksimal karena situasinya tidak stabil setelah beliau lengser."	Stagnasi operasional program pembangunan dan pelayanan publik.
	Efek Psikologis Warga	Jein Djibu	"Kalau bicara soal itu, masyarakat jadi agak tegang. Takut salah bicara karena bisa menimbulkan masalah..."	Kecemasan sosial dan rasa saling curiga antar-individu.
Upaya Penyelesaian	Putusan Yuridis Formal	Amran Saripi	"Masalah itu sampai ke Mahkamah Agung... akhirnya diputuskan bahwa beliau diberhentikan sesuai dengan keputusan yang berlaku."	Penegakan kepastian hukum formal mengakhiri sengketa status.
	Transisi Kepemimpinan	Ruis Adam	"Setelah beliau tidak menjabat lagi, kemudian wakil bupati diangkat untuk menggantikan. Dari situ pemerintahan mulai berjalan..."	Pengisian posisi definitif untuk stabilisasi roda pemerintahan.
	Rekonsiliasi Alamiah Warga	Amran Saripi	"Sekarang masyarakat sudah mulai berbaur lagi. Walaupun dulu sempat ada perbedaan, tapi sekarang sudah mulai saling berkomunikasi..."	Pemulihan relasi warga berbasis modal sosial kekerabatan lokal.
	Keterbukaan Komunikasi	Ruis Adam	"Sekarang pemerintah sudah mulai lebih terbuka. Kalau ada kebijakan, biasanya sudah disampaikan lebih dulu supaya tidak terjadi kesalahpahaman..."	Reorientasi pola komunikasi publik yang partisipatif.

Dari tabel di atas, beberapa penjelasan yang menjadi temuan dalam penelitian terkait konflik politik yang terjadi di Kabupaten Boalemo, baik faktor penyebab dan upaya penyelesaian konflik dapat digambarkan dan dijelaskan sebagaimana hasil peroleh wawancara dari beberapa orang informan. Paling tidak apa yang menjadi pemicu konflik dapat ditelusuri akibat dari ; Pertama, persoalan Ketidakstabilan Afiliasi Politik Bupati seperti, manuver politik berpindah partai dari Hanura, Nasdem, hingga ke PDIP memicu kekecewaan massa pendukung awal. Sebagaimana diungkapkan oleh Ruis Adam, inkonsistensi ini melahirkan *trust-based conflict* yang merusak jaringan loyalitas tradisional dan memecah kelompok konstituen menjadi faksi-faksi kecil.

Kedua ketimpangan pembangunan wilayah: pemusatan proyek strategis di Kota Raja memunculkan sentimen diskriminasi geografis. Kesaksian Nurdin M. Jaini menunjukkan bahwa warga di luar pusat kota (seperti Desa Dulupi) merasa "dianaktirikan", yang pada akhirnya memperlemah kohesi sosial antarwilayah dan menumbuhkan rasa ketidakadilan kolektif. Dan Ketiga, Hubungan Tidak Harmonis dengan Aparatur Pemerintahan. Pola komunikasi verbal bupati

yang dinilai merendahkan bawahan menciptakan keretakan di internal birokrasi. Menurut Jein Djibu,sevagaimana dikutip diatas, sikap tersebut memicu rasa tidak dihargai dan membuahkan resistensi pasif (*passive resistance*) dari para ASN, yang berdampak pada penurunan efektivitas tata kelola pemerintahan.

B. Penyebab Pasca-Lengsernya Bupati Boalemo

Identifikasi penyebab konflik di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Boalemo pada saat kepemimpinan Darwis Moridu diantaranya, pertama pengaktifan kembali kasus hukum lama : kasus pidana masa lalu yang diendapkan selama hampir 10 tahun kembali diangkat oleh kelompok oposisi hingga tingkat Mahkamah Agung. Sebagaimana dijelaskan Erwan Djibu, re-aktivasi konflik laten ini dimanfaatkan sebagai sarana delegitimasi politik untuk menjatuhkan posisi Darwis Moridu dan kepemerintahannya.

Kedua, konflik akibat persoalan administrasi dan ijazah, keraguan publik atas keabsahan dokumen pendidikan bupati yang digugat di PTUN memperlemah legitimasi formal. Erwan Djibu menegaskan bahwa penggunaan surat keterangan kepolisian sebagai pengganti ijazah menciptakan krisis kepercayaan terhadap integritas administrasi pencalonan. Ketiga, konflik akibat tidak difungsikannya wakil bupati: Pengabaian peran Wakil Bupati dalam pengambilan keputusan strategis menandai pemusatan kekuasaan sepihak. Jein Djibu mengungkapkan bahwa ketiadaan pelibatan ini memecah struktur eksekutif dan menciptakan pembelahan dualisme loyalitas di dalam birokrasi.

Keempat, konflik akibat perilaku personal yang kontroversial. Tindakan emosional dan dugaan insiden pemukulan di ruang publik mengikis legitimasi moral bupati. Amran Saripi menuturkan bahwa karakter kepemimpinan yang dinilai emosional memicu gelombang penolakan terbuka dari masyarakat sipil. Kelima, konflik akibat lemahnya komunikasi kebijakan: Penetapan kebijakan tanpa ruang dialog publik memicu misinterpretasi warga. Penjelasan Amran Saripi membuktikan bahwa ketiadaan transparansi mendorong tumbuhnya prasangka dan aksi penolakan dari kelompok-kelompok penentang di tingkat massa.

C.Dampak Konflik Terhadap Masyarakat dan Pemerintahan

Eskalasi konflik politik elit membawa dampak berantai yang merusak tatanan sosial warga serta kelancaran operasional birokrasi daerah. Soal-soal seperti ini cukup tergambarkan pada tabel diatas. Pertama, perubahan kondisi sosial masyarakat, dimana terjadi fragmentasi sosial di mana ikatan kekerabatan warga di Desa Dulupi tergerus oleh perbedaan pandangan politik. Ruis Adam menggambarkan bagaimana warga saling menjauh akibat prasangka politik yang memecah kohesi lokal. Kedua, perubahan perilaku masyarakat, warga mentransformasikan pola interaksinya menjadi lebih defensif dan tertutup. Nurdin M. Jaini mencatat timbulnya sikap apatis warga yang enggan terlibat dalam pembicaraan politik atau program pemerintah guna menghindari gesekan sosial.

Ketiga, terganggunya sistem pemerintahan: Stabilitas birokrasi mengalami disfungsi pasca-pemberhentian bupati. Erwan Djibu memaparkan bahwa ketidakpastian kepemimpinan membuat eksekusi program pembangunan sempat stagnan dan mengganggu kualitas pelayanan publik.

Ketiga, efek psikologis dan hubungan sosial, Munculnya rasa cemas dan tegang dalam berinteraksi sehari-hari. Jein Djibu menegaskan adanya ketakutan warga dalam berbicara secara bebas, yang mereduksi kualitas kepercayaan antar-individu di lingkungan tetangga.

A. Upaya Penyelesaian dan Rekonsiliasi

Proses pemulihan kondisi pemerintahan dan lingkungan sosial masyarakat ditempuh melalui kombinasi penyelesaian formal dan kultural: pertama, penyelesaian melalui jalur hukum: Putusan Mahkamah Agung memberikan kepastian yuridis formal (*inkracht*) yang menghentikan sengketa status kepemimpinan. Sebagaimana disampaikan Amran Saripi, mekanisme peradilan menjadi dasar legalitas resmi pemberhentian kepala daerah. Kedua, pergantian kepemimpinan dan transisi pemerintahan. Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati definitif berhasil mengisi kekosongan kekuasaan (*power vacuum*). Ruis Adam menyatakan bahwa langkah transisi ini secara perlahan memulihkan operasional tata kelola pemerintahan.

Ketiga, stabilisasi kembali pemerintahan. Penataan kembali iklim kerja birokrasi memulihkan fungsi-fungsi pelayanan umum. Erwan Djibu mengonfirmasi bahwa setelah masa transisi yang sulit, koordinasi antar-dinas kembali berjalan normal. Keempat, meredanya konflik secara bertahap di masyarakat: Ketegangan sosial di tingkat *grassroots* mengalami penurunan intensitas. Jein Djibu menuturkan bahwa seiring hilangnya pemicu politik elit, situasi kemasyarakatan kembali tenang secara alaminya.

Kelima, pemulihan hubungan sosial masyarakat: Keberadaan modal sosial berupa ikatan kekerabatan mendorong terlaksananya rekonsiliasi alamiah. Amran Saripi mengungkapkan bahwa warga kembali berbaur dan berkomunikasi melalui interaksi sosial sehari-hari. Dan, keenam, penyesuaian komunikasi pemerintah. Pemerintah daerah pasca-transisi mereorientasi pola komunikasi publik menjadi lebih transparan. Ruis Adam menegaskan bahwa keterbukaan informasi atas kebijakan baru berhasil mencegah timbulnya kesalahpahaman dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.

DISCUSSION

Penemuan lapangan mengenai dinamika konflik di Kabupaten Boalemo memberikan konfirmasi konseptual terhadap Teori Konflik Dialektika Ralf Dahrendorf. Dahrendorf menegaskan bahwa konflik sosial tidak selalu bersumber dari faktor ekonomi semata, melainkan dari struktur kekuasaan dan otoritas yang timpang dalam entitas sosial (*imperatively coordinated associations*) (Dahrendorf, 1959, hlm. 168). Dalam konteks kepemimpinan Bupati Darwis Moridu, kepemimpinan otoritatif tanpa diimbangi oleh konsensus dan keadilan distribusi kekuasaan memicu lahirnya *dichotomous positions* antara kelompok penguasa dan kelompok yang dikuasai.

Praktik nepotisme dalam alokasi proyek serta pemusatan pembangunan di Kota Raja merupakan manifestasi nyata dari konflik distribusi sumber daya (*resource distribution conflict*). Kelompok elit lokal yang memiliki akses kekuasaan memanfaatkan otoritas untuk mendatangkan keuntungan materiil bagi kelompoknya, sementara warga di kawasan periferi seperti Desa Dulupi terasingkan

dari manfaat pembangunan (Turner, 2018, hlm. 205). Kondisi ketimpangan struktural ini melahirkan kekecewaan kolektif, yang dalam pandangan Dahrendorf memicu konversi dari *latent interests* menjadi *manifest interests* berupa gerakan penolakan publik (Dahrendorf, 1959, hlm. 175; Rahman, 2022, hlm. 138).

Perpindahan partai politik secara berulang serta pengabaian peran Wakil Bupati mencerminkan konflik kepentingan (*interest conflict*) dan konflik otoritas (*authority conflict*). Ketidakstabilan afiliasi partai melemahkan loyalitas konstituen (Nugroho, 2019, hlm. 115), sementara marjinalisasi posisi wakil bupati merusak asas tata kelola pemerintahan berbasis kepemimpinan kolektif-kolegial (Wijaya & Lestari, 2023, hlm. 160). Ketika hierarki otoritas formal dijalankan secara sepihak, friksi internal dalam birokrasi tidak terhindarkan. Hal ini memicu penolakan dari aparatur pemerintah yang merasa hak otoritasnya diabaikan (Dahrendorf, 1959, hlm. 182).

Pengaktifan kembali kasus hukum sepuluh tahun silam dan gugatan keabsahan ijazah di PTUN menandai peralihan konflik laten menjadi konflik terbuka (*manifest conflict*). Instrumen hukum formal dimanfaatkan oleh kelompok oposisi untuk meruntuhkan legitimasi pimpinan daerah (Wang & Zhang, 2020, hlm. 312). Ketiadaan legitimasi formal (administrasi ijazah) yang berkelindan dengan krisis legitimasi moral (sikap emosional dan kasus pemukulan) secara drastis menurunkan tingkat kepercayaan publik (*public trust*) (Sari & Putra, 2021, hlm. 92). Dahrendorf menggarisbawahi bahwa kekuasaan tanpa legitimasi sosial yang kuat akan runtuh ketika dihadapkan pada tekanan kelompok oposisi yang terorganisir (Dahrendorf, 1959, hlm. 190).

Dampak konflik terhadap fragmentasi sosial dan perubahan perilaku masyarakat Desa Dulupi memperlihatkan bagaimana krisis politik elit dapat merusak jaringan solidaritas lokal. Pergeseran perilaku warga menjadi lebih tertutup dan defensif merupakan mekanisme adaptasi psikologis dalam menghadapi ketidakpastian sosial (Hidayat & Kurniawan, 2021, hlm. 82; Lestari, 2023, hlm. 206). Namun demikian, sebagaimana dihipotesiskan oleh Dahrendorf, konflik tidak selalu bersifat destruktif; konflik juga berfungsi sebagai pendorong perubahan struktural dan integrasi baru (*structural change and re-integration*) (Dahrendorf, 1959, hlm. 208).

Penyelesaian konflik melalui putusan Mahkamah Agung dan pengangkatan wakil bupati sebagai pejabat definitif memperlihatkan bekerjanya resolusi konflik berbasis kepastian hukum (*formal institutional resolution*) (Santoso, 2020, hlm. 120; Arifin, 2021, hlm. 58). Proses ini berhasil menstabilkan kembali fungsi birokrasi dan tata kelola pelayanan publik (Wibowo, 2022, hlm. 102). Sementara itu, pemulihan hubungan warga di Desa Dulupi yang berlangsung secara alamiah dibantu oleh nilai-nilai kebersamaan lokal yang mampu meredam perbedaan pilihan politik (Sulaiman, 2023, hlm. 144). Perbaikan transparansi komunikasi kebijakan oleh pemerintah daerah transisi menjadi penutup proses dialektika konflik, yang melahirkan pola hubungan sosial-politik yang lebih inklusif dan responsif (Handayani, 2021, hlm. 175).

2. CONCLUSION

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konflik pasca-lengsernya Bupati Boalemo (Darwis Moridu) merupakan hasil dari interaksi kompleks antara

faktor multidimensi. Pemicu utama konflik mencakup ketidakstabilan afiliasi politik, ketimpangan distribusi pembangunan antarwilayah, hubungan kerja yang destruktif dalam birokrasi, pengabaian peran wakil bupati, isu etika personal, serta pengaktifan kembali kasus hukum lama dan keabsahan administrasi ijazah. Secara teoritis, faktor-faktor ini merupakan bentuk konflik otoritas, konflik legitimasi, dan konflik distribusi sumber daya sebagaimana dirumuskan dalam Teori Konflik Dialektika Ralf Dahrendorf.

Dampak dari eskalasi konflik ini memicu keretakan hubungan sosial di tingkat warga, tumbuhnya perilaku defensif-apatis, ketegangan psikologis, serta terganggunya stabilitas operasional birokrasi pemerintahan daerah. Kendati demikian, dinamika konflik ini melahirkan resolusi yang konstruktif melalui koridor hukum Mahkamah Agung, transisi kepemimpinan struktural, serta pemulihan hubungan sosial berbasis nilai kekerabatan lokal. Penyesuaian komunikasi kebijakan yang lebih transparan oleh pemerintah daerah transisi menjadi wujud tatanan ketaatan dan keterbukaan baru. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan kelembagaan sosialisasi kebijakan publik, kepemimpinan partisipatif, serta penegakan etika politik bagi pejabat daerah guna mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan.

3. REFERENCES

Arifin, Z. (2021). *Suksesi Kepemimpinan Daerah dan Stabilitas Politik Lokal*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(1), 45–62.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press.

Firmansyah, A. (2022). *Kinerja Birokrasi Pasca-Krisis Kepemimpinan di Daerah*. Jurnal Tata Kelola & Birokrasi, 8(2), 89–105

Hadiz, V. R. (2019). *Dinamika Politisi Lokal dalam Era Desentralisasi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Handayani, S. (2021). *Transparansi Komunikasi Publik dalam Pencegahan Konflik Sosial*. Jurnal Komunikasi Pemerintahan, 15(3), 167–182.

Hidayat, R., & Kurniawan, B. (2021). *Perilaku Politik Warga Pasca-Eskalasi Konflik Pilkada*. Jurnal Sosiologi Politik, 9(1), 71–88

Kurniawati, D. (2019). *Mekanisme Penurunan Intensitas Konflik Sosial di Pedesaan*. Jurnal Konflik dan Rekonsiliasi, 4(2), 110–125

Lestari, P. (2023). *Dampak Psikologis Konflik Politik Terhadap Kohesi Kemasyarakatan*. Jurnal Psikologi Sosial, 17(2), 195–210

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldanha, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications

Nugroho, A. (2019). *Ketidakstabilan Partai Politik dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Lokal*. Jurnal Politika, 10(2), 108–122.

Prasetyo, E. (2020). *Fragmentasi Sosial Pasca-Pilkada di Tingkat Desa*. Jurnal Sosiologi Pedesaan, 14(1), 58–74.

Rahman, F. (2022). *Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Potensi Konflik Lokal*. Jurnal Perencanaan Wilayah, 11(2), 128–145

Santoso, B. (2020). *Peran Lembaga Peradilan dalam Menyelesaikan Sengketa Kepala Daerah*. Jurnal Hukum Pemerintahan, 6(1), 102–118.
Sari, M., & Putra, A. (2021). *Legitimasi Administrasi dan Kepercayaan Publik Terhadap Pemimpin Daerah*. Jurnal Administrasi Publik, 13(1), 81–96.
Sulaiman, A. (2023). *Nilai Kekerabatan Sebagai Modal Sosial Rekonsiliasi Desa*. Jurnal Antropologi Indonesia, 44(2), 135–150.
Turner, M. (2018). *Resource Allocation and Local Political Struggles in Southeast Asia*. Pacific Affairs, 91(2), 195–212
Wang, Y., & Zhang, X. (2020). *Re-activation of Latent Conflicts in Local Governance*. Journal of Asian Public Policy, 13(3), 301–318.
Wibowo, H. (2022). *Stabilisasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Pasca-Transisi Kekuasaan*. Jurnal Manajemen Pemerintahan, 7(1), 90–106.
Wijaya, C., & Lestari, D. (2023). *Gaya Kepemimpinan dan Konflik Internal Organisasi Birokrasi*. Jurnal Studi Pemerintahan, 14(2), 148–165.